

**PERKEMBANGAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PADANG
TAHUN 1982-1998**

SKRIPSI

Oleh :

Cosma Putra
02 181 003



**JURUSAN ILMU SEJARAH FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2010**

ABSTRAK

Skripsi ini mendeskripsikan tentang sejarah organisasi dan fokus penelitian ini pada sejarah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dan perkembangannya pada masa Orde Baru hingga berakhirnya rezim Orde Baru. Sesuai dengan fokus penelitian, maka penelitian ini diberi judul **“Perkembangan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang (1982-1998)”**.

Penulisan ini dilakukan melalui penelitian dengan menggunakan metode sejarah. Metode sejarah meliputi empat tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tahap pertama adalah pengumpulan sumber, penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder berupa arsip, dokumen serta sumber lisan. Sumber arsip dan dokumen penulis dapatkan dari kantor LBH Padang, dan Pengadilan Negeri Provinsi dan Kabupaten. Untuk sumber lisan, penulis dapatkan dari wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti mantan Direktur LBH Padang, anggota LBH Padang dan masyarakat yang pernah di bantu oleh LBH Padang. Kesemua sumber di kritik secara internal menyangkut keaslian (otentitas) dan eksternal yang berkenaan dengan kredibilitas sumber. Berikutnya dilakukan interpretasi yakni proses merangkai fakta-fakta menjadi kesatuan makna dan selanjutnya dilakukan penulisan sejarah atau yang disebut dengan historiografi.

Skripsi ini mencoba menjelaskan tentang perkembangan LBH Padang selama Orba, LBH Padang berkembang ditengah derasnya intervensi dari pemerintah. Bagaimanapun, sebagai lembaga masyarakat yang menyoroti berbagai kebijakan pemerintah terutama di bidang hukum dan HAM, adalah suatu kewajaran apabila dalam perjalanannya organisasi ini sering mendapatkan intervensi dan menjadikan lembaga ini sebagai musuh pemerintah. Intervensi pemerintah ikut menjadi faktor penentu pasang surut LBH Padang selama 16 tahun perjalanannya sehingga sempat mengalami kevakuman dari tahun 1986-1994. Tahun 1994 LBH Padang bangkit kembali dan melakukan aktivitas bantuan hukum struktural secara maksimal.

Bantuan hukum struktural LBH Padang dibagi dalam dua periode yaitu periode pertama tahun 1982-1994, periode ini LBH Padang lebih banyak melakukan kegiatan litigasi yaitu advokasi korban di pengadilan. Sedangkan periode ke dua yaitu tahun 1994-1998, LBH Padang melakukan kegiatan litigasi dan non litigasi secara beriringan seperti bantuan pengacara terhadap korban tanah ulayat diiringi dengan penelitian terhadap kasus tersebut dan kasus-kasus serupa. Kegiatan non litigasi yang lain seperti kampanye hukum dan HAM, dan pendidikan hukum dan HAM bagi masyarakat luas.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1980-an menjadi tahun-tahun awal munculnya berbagai LSM di Indonesia, diantaranya yang bergerak dibidang politik, sosial dan budaya. LSM atau yang pada tahun 1980 disebut organisasi non pemerintah (Ornop) merupakan terjemahan langsung dari istilah Non Government Organization (NGO). Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang resmi berdiri pada tanggal 20 Januari 1982 di bawah pimpinan Zahirudin, S.H., atas prakarsa Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) Sumatera Barat. Gagasan tentang perlunya LBH di Padang muncul pada tahun 1979 dalam lokakarya Peradin di Prapat Medan Sumatera Utara. Sebelum lokakarya digelar, Zahiruddin S.H., telah mengenal Adnan Buyung Nasution, dan mengagumi sosok beliau karena keberhasilan LBH Jakarta mengatasi berbagai persoalan hukum dan HAM. Zahiruddin dan anggota Peradin lainnya seperti Djanas Raden S.H dan Abdul Khadir Usman S.H., mendesak Zahiruddin S.H., untuk meminta persetujuan Adnan Buyung Nasution mendirikan LBH di Padang. Permintaan tersebut disetujui sekalipun dengan konsekuensi seluruh biaya operasional kantor ditangani sendiri karena keterbatasan anggaran LBH Jakarta pada waktu itu.¹

Pada periode pertama kepemimpinan di LBH yaitu dari tahun 1982 hingga tahun 1984, LBH Padang di samping memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas, juga menumbuhkembangkan dan memajukan pengertian dan

¹Virza Benzani (ed.), *Buku Putih LBH Padang* (Padang: Agustus 1998), Hal 4.

penghormatan nilai-nilai negara hukum dan HAM, meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat khususnya, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa agar mengetahui akan hak-hak dan kewajibannya sebagai subyek hukum.

Dalam perjalanannya kemudian, terjadi perubahan kepengurusan di tubuh LBH Padang, karena terhitung sejak tanggal 2 Agustus 1984, Zahiruddin mengundurkan diri sebagai direktur. Sejak itu, terhitung mulai tanggal 6 Agustus 1984 sampai dengan 5 Februari 1985, roda kepengurusan LBH Padang dijalankan oleh sebuah presidium terdiri dari Djanas Raden, S.H., Abdul Kadir Usman, S.H. dan Hj. Asma Naim, S.H. Kemudian pada tanggal 6 Februari 1985, kepemimpinan LBH Padang dipegang oleh Abdul Kadir Usman, S.H. Pada jaman itu, LBH Padang lebih banyak melakukan kerja-kerja litigasi (peradilan), disamping kerja non litigasi seperti penyuluhan hukum melalui media massa, seminar dan lokakarya yang diselenggarakan dalam rangka menyambut HUT LBH Padang.² Pada masa kepemimpinan Abdul Kadir Usman, S.H. terjadi penurunan kinerja LBH Padang, disebabkan faktor dana yang tidak memadai dan kesibukan pada pengurus yang lebih banyak melakukan pelayanan hukum melalui pekerjaan pribadi. Akhirnya sejak tahun 1988, praktis LBH Padang tidak lagi aktif menjalankan roda perjuangannya, oleh beberapa senior LBH disebut sebagai masa kevakuman LBH Padang. Berhubung LBH Padang tidak lagi bisa menjalankan kerja-kerjanya, maka Abdul Kadir Usman, S.H., diberhentikan dari jabatannya sebagai direktur terhitung sejak tanggal 10 Juni 1994 oleh Dewan Pengurus YLBHL.

² Yanrifal Jaya Putra, *Ibid.*, hal. 7-8.

BAB IV

KESIMPULAN

Dalam dua dekade terakhir, organisasi masyarakat sipil atau LSM mengalami perkembangan yang lumayan pesat, mulai dari jumlah maupun keberagaman peran. Ribuan organisasi masyarakat sipil khususnya LSM, bermunculan di berbagai daerah, mereka melakukan peran melalui berbagai program dan aktivitas guna memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat seperti pengembangan ekonomi kelompok masyarakat miskin, studi kasus antar agama, mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam perumusan kebijakan publik dan bantuan maupun penyuluhan hukum bagi masyarakat miskin.

Pesatnya pertumbuhan LSM memang baru di mulai sejak runtuhnya rezim Orba, tetapi cikal bakalnya telah tumbuh sejak tahun 1980-an, hal ini ditandai dengan munculnya ribuan LSM di Indonesia, tidak terkecuali di Sumatera Barat. Di Sumbar lahir beberapa LSM seperti Lembaga Riset dan Advokasi, LP3ES, Gerakan ABS-SBK, Gemalia Bundo Kandung dan Lembaga Bantuan Hukum. Organisasi ini sebagian besar adalah organisasi cabang dari organisasi yang sama di Jakarta, hanya beberapa saja LSM yang perkerakannya bersifat lokal.

Pada era 1980-an LSM muncul di Indonesia karena adanya sikap otoriter dari pemerintah Orba yang menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat, hal ini sangat terasa di bidang hukum dan HAM. Hegemoni kekuasaan pada masa Orba menyebabkan benturan antara rakyat dan pemerintah, untuk mengatasi berbagai persoalan dibidang hukum dan HAM, kemudian masyarakat berpendidikan

DAFTAR PUSTAKA

1. Arsip dan Dokumen

Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ.) Rahmat Wartira SH (Direktur LBH Padang periode 1994-1997).

Surat Keputusan YLBHI Pusat Nomor 001/Kep/10/1970, tanggal 26 Oktober 1970.

Surat Rekomendasi LBHI Padang No: 6/Q.KLH/LBH-Padang/ VIII/1998.

Undang-undang No. 4 tahun 1982 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

2. Buku-buku

Archer, Jules, *Kisah Para Diktator* (Yogyakarta: Narasi, 2007).

Bakke, E. Waitih, *Dasar-Dasar Organisasi* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1989).

Benzani, Virza, *Buku Putih LBHI Padang* (Padang: LBH Padang, Agustus 1998).

Gothchalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, Terjemahan Nugroho Noto Susanto (Jakarta: Yayasan Penerbitan Universitas Indonesia, 1975).

K., Ramadhan (dkk.), *Memoar Adnan Buyung Nasution: Pergulatan Tanpa Henti* (Jakarta: Aksara Karunia, 2001).

K., Ramadhan (dkk.), *Memoar Adnan Buyung Nasution: Pergulatan Tanpa Henti II* (Jakarta: Aksara Karunia, 2004).

LBHI Padang, *Buku Putih LBHI Padang* (Padang: LBHI Padang, Oktober 2005).

Lohanda, Mona, *Sumber Sejarah dan Penelitian Sejarah* (Jakarta: BPK dan PK Universitas Indonesia, 1998).

Novia, Windy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kashiko, 2007).

Nursahid, Fajar (ed.), *Menjadi LSM Akuntabel* (Padang: KPPM, 2005).